



# NEKA DAKU NGONG DATA

## Suara Leluhur yang Menampar Wajah Koruptor

Oleh Berno Jani

Putra Manggarai di Seminari Tinggi St. Kamilus, Nita  
Maumere – Kabupaten Sikka

### Pengantar

Setiap tahun bangsa ini merayakan Hari Pendidikan Nasional dengan penuh semangat. Tetapi ada ironi besar yang terus luput dari perhatian publik bahwa pendidikan tak selamanya melahirkan manusia yang bermoral. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (Annur, 2023) justru menunjukkan bahwa mayoritas koruptor berasal dari kalangan terdidik, doktor, profesor, bahkan alumni kampus ternama.

Ini merupakan sinyal bahwa sistem pendidikan kita sebetulnya salah arah. Kita terlalu sibuk mengasah nalar, tetapi lalai menumbuhkan nurani dan akhlak baik. Kita juga sibuk berkompetisi dengan negara lain, tetapi mengabaikan penyakit kronis yang sedang dihadapi bangsa sendiri yakni korupsi. Akibatnya, nilai-nilai luhur yang mestinya tumbuh subur di desa-desa justru tergerus oleh kerakusan. Dana desa dikorupsi, aparat desa berkhianat pada amanat rakyat, dan kejujuran menjadi barang langka di tempat yang semestinya jadi benteng moral.

Kondisi serupa kini merambah Manggarai. Penyalahgunaan dana desa meningkat dan wisata super premium diam-diam dijadikan ladang permainan mafia tanah. Hak ulayat dirampas, adat diinjak-injak, dan tanah leluhur dijual dengan dalih pembangunan. Ini bukan sekadar persoalan hukum semata,

tetapi sebetulnya krisis akhlak yang sangat serius.

Padahal masyarakat Manggarai punya warisan moral yang luar biasa dalam bentuk *go'et* atau petuah adat yang menjadi kompas hidup. Salah satu pepatah yang paling sakral adalah "*neka daku ngong data*", yang mengandung nilai pengekanng keserakahan dan penguat moralitas. Kini saatnya seruan ini dihidupkan kembali, supaya tidak hanya sekadar sebagai simbol budaya atau warisan masa lalu, tetapi sebagai tameng nurani di tengah derasnya arus materialisme dan ketamakan yang menggerogoti para pemimpin.

### Dana Fiktif dan Mafia Agraria

Masyarakat sering kali bersikap apatis atau acuh tak acuh terhadap masalah korupsi yang sedang menggurita. Padahal korupsi memiliki dampak yang sangat masif mulai dari biaya hidup yang mahal sampai pada korban yaitu kelompok rentan yang tak mampu bersuara. Dampak utama dari korupsi adalah kemiskinan struktural.

Fenomena korupsi juga tengah merebak di Manggarai. Ini adalah penyalahgunaan wewenang dan keretakan etis dalam tubuh birokrasi lokal. Bagaimana mungkin di wilayah yang dikenal dengan kekayaan budaya dan keluhuran adat justru korupsi terus berkecambah. Hal ini menunjukkan paradoks antara kekayaan warisan

moral leluhur dan praktik kekuasaan kontemporer yang tak berujung.

Kejaksaaan Negeri Manggarai Barat telah menetapkan empat tersangka dalam dua kasus penyalahgunaan Dana Desa yang terjadi di Desa Golo Lujang (Hartono, 2025). Tiga aparat desa dari Golo Lujang yaitu mantan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara telah menyalahgunakan anggaran tahun 2021–2022 dengan total kerugian negara sebesar Rp.952.071.408. Berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, di Desa Lale, seorang mantan kepala desa juga ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp.650.422.405.

Jika dikalkulasi nilai kerugian yang mencapai lebih dari Rp1,6 miliar. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya posisi anggaran desa sebagai sumber pembangunan sekaligus titik rawan penyimpangan. Fakta mencatat bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan fiktif; aktivitas dicatat dalam dokumen, tetapi tidak pernah terlaksana secara faktual. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran yang tidak hanya legalistik, tetapi juga moral dan filosofis: penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan diri di atas mandat publik.

Hal lain yang masih terjadi ialah mafia tanah di Labuan Bajo, sebuah fenomena kriminalitas agraria yang mengoyak relasi antara negara,





masyarakat, dan ruang hidupnya. Di tengah arus investasi global dan euforia pariwisata, tanah adat yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 18 B UUD 1945 dan dijelaskan melalui doktrin hak ulayat, menjadi korban permainan spekulatif oleh segelintir elite yang berkolusi: tua adat palsu, oknum kepala desa, notaris, pejabat BPN, hingga aparat penegak hukum (Hardum, 2024). Skema kejahatan berlangsung rapi, sistematis, dan menyerupai praktik kartel, menggunakan dokumen palsu, rekayasa hukum, hingga penyanderaan yuridis atas hak masyarakat adat.

Tanah yang semestinya menyimpan ingatan kolektif dan nilai-nilai kosmologis (*lingko*, *gendang*, *kapu manuk*, *lele tuak*) direndahkan menjadi objek yang layak diperjualbelikan. Ketika tanah adat berubah status tanpa proses adat yang sah dan negara tak hadir atau justru turut menjadi fasilitator melalui aparatnya yang menyimpang, maka krisis yang terjadi bukan semata agraria, tetapi krisis moral.

### Seruan Para Leluhur

Masyarakat Manggarai sejak lama hidup dalam pelukan nilai-nilai adat yang kaya, sebuah warisan leluhur yang tak hanya mengatur tata cara bertani maupun bermasyarakat, tetapi menanamkan etika hidup ke dalam diri tiap generasinya. Salah satu warisan leluhur yang menjadi mantra kehidupan adalah pepatah adat: “*neka daku ngong data*”.

Sebenarnya, ungkapan ini sangat panjang yakni “*eme data, data muing, neka daku ngong*” yang secara harfiah berarti “kalau milik orang hendaklah katakan milik orang, jangan mengklaim milik atau kepunyaan orang lain sebagai milik saya”. Penulis memperpendek ungkapan ini dengan mengambil penggalan akhir yang jika diterjemahkan berarti “jangan mengklaim milik orang lain sebagai milik saya”. Makna pepatah ini melampaui kepemilikan harta benda. Ia menjamah soal martabat, hak asasi, dan batas nurani yang tak boleh dilangkahi, bahkan oleh pikiran.

Latar belakang munculnya pepatah ini adalah karena konflik sosial yang

melanda masyarakat Manggarai waktu itu (Jani, 2025:25-26)). Persoalan seperti perebutan tanah ulayat (*rumbu lingko*), pencurian harta warisan (*tako ceca data*), dan perzinahan (*roko wina data*) menjadi sumber utama ketegangan sosial. Masalah-masalah ini tidak hanya dipicu oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh egoisme, kesalahan dalam memahami hak milik, dan krisis nilai yang menimbulkan keretakan dalam tatanan hidup bersama (*mose renceng*).

Untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial, para tua adat (*tua golo, tua teno, dan tua kilo*) merumuskan ungkapan adat *neka daku ngong data*, yang berarti “jangan mengambil milik orang lain sebagai milik saya.” Ungkapan ini berfungsi sebagai prinsip moral dan norma adat yang mengingatkan masyarakat agar menghormati kepemilikan, baik terhadap tanah, warisan, maupun pasangan orang lain. Sebagai *go’et*, ungkapan ini memiliki fungsi preventif dan korektif terhadap potensi pelanggaran hak milik dalam masyarakat.

Dalam konteks adat, pelanggaran terhadap hak atas tanah, misalnya *hang langang data* (memindahkan batas kebun), diselesaikan melalui mekanisme adat yang melibatkan simbol seperti *haju teno*, kayu khusus yang melambangkan kejujuran dan keadilan. Begitu pula dalam kasus perzinahan dan pencurian warisan, sanksi adat dikenakan tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan terhadap nilai-nilai yang dilanggar. Beberapa sanksi bahkan diyakini bersifat spiritual, seperti kutukan leluhur atau kegagalan hidup bagi pelaku pelanggaran.

Dari sudut pandang filosofis, *neka daku ngong data* mencerminkan pandangan hidup masyarakat Manggarai yang menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan kosmis. Individu tidak dipandang sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai bagian dari jaringan sosial dan spiritual yang saling terhubung. Dengan demikian, pelanggaran terhadap milik orang lain bukan hanya persoalan pribadi, tetapi

menyangkut keharmonisan seluruh komunitas dan hubungan dengan leluhur.

Meskipun peran institusi formal seperti pemerintah dan agama kini turut campur tangan dalam penyelesaian konflik, keberadaan ungkapan adat seperti *neka daku ngong data* tetap relevan dan dihormati. Nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan ini menjadi panduan moral yang hidup dalam keseharian masyarakat, membentuk kesadaran kolektif bahwa perdamaian dan kesejahteraan hanya dapat tercapai jika setiap orang menjaga hak, martabat, dan milik sesamanya.

Dalam praktik sosial, *go’et* berfungsi dalam tiga dimensi utama (Jani, 2025: 23) : meneguhkan, menyadarkan, dan menguatkan. *Pertama*, *go’et* meneguhkan individu dalam mempertahankan prinsip kebenaran dan martabat kemanusiaan di tengah realitas sosial yang kerap melemahkan nilai-nilai tersebut. *Kedua*, *go’et* menyadarkan individu akan pentingnya hidup dalam keteraturan sosial, mengendalikan kebebasan pribadi demi harmoni bersama, serta mematuhi norma sebagai bentuk tanggung jawab moral. Fungsi ini mengintegrasikan aspek filosofis bahwa manusia hidup dalam relasi yang saling mengikat, bukan sebagai entitas yang bebas tanpa batas.

*Ketiga*, *go’et* berperan sebagai sumber penguatan batin dalam menghadapi situasi sulit, krisis, dan penderitaan. Melalui ungkapan-ungkapan simbolik yang mengandung makna mendalam, *go’et* memberi perspektif reflektif dan spiritual untuk menavigasi tantangan hidup. Di sisi lain, *go’et* juga menjalankan fungsi kritik sosial dalam bentuk sindiran yang bertujuan untuk mengoreksi perilaku menyimpang secara halus namun efektif, sehingga mencegah narasi atau tindakan negatif sebelum berkembang lebih jauh.

Dalam masyarakat yang masih hidup berdampingan dengan alam dan adat, pepatah ini menjadi semacam pagar tak kasatmata. Ia mencegah tangan dari mengambil yang bukan haknya, menahan niat, menertibkan keinginan, dan mendidik hati agar tak serakah. Ia menanamkan rasa malu, bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar bahwa setiap jengkal yang kita rebut dari orang lain adalah penghinaan terhadap martabat mereka. “*Neka daku ngong data*” adalah refleksi tertinggi dari rasa hormat terhadap sesama manusia, sebuah nilai yang makin tergerus di tengah arus modernitas yang rakus.

Lebih jauh lagi, pepatah ini

mengajarkan bahwa hidup bersama hanya mungkin terwujud bila hak setiap orang diakui dan dihargai secara utuh. Ia menolak dominasi, menentang penindasan dan membentengi masyarakat dari jebakan kapital yang hanya mengenal kuasa dan kepemilikan. Dalam dunia yang kian kehilangan kompas moral dimana tanah warisan dijual dan hak ulayat ditukar dengan proyek-proyek raksasa tanpa persetujuan, "*neka daku ngong data*" adalah benteng terakhir, seruan untuk melawan ketidakadilan dan mempertahankan kebenaran. *Neka daku ngong data* menegaskan bahwa mengambil sesuatu, sekecil apa pun, yang bukan hak kita adalah bentuk paling sunyi tetapi menyakitkan dari kekerasan sosial.

Dengan demikian "*neka daku ngong data*" adalah ajaran untuk hidup dengan takaran yang adil dalam menyikapi relasi kuasa, ruang pribadi, dan bahkan wacana publik. Ia membentuk manusia agar cerdas secara logika, tajam dalam rasa, peka terhadap yang kecil, dan hormat terhadap yang lemah. Dalam era ketika integritas lebih sering menjadi jargon ketimbang kenyataan, pepatah ini muncul sebagai lonceng moral yang berdentang di tengah pengabaian terhadap suara hati.

### Tameng Melawan Hasrat Ingat Diri

Korupsi dana desa membawa goresan luka yang dalam karena sebuah pengkhianatan terhadap mandat yang dipercayakan oleh masyarakat. Wilayah yang seharusnya menjadi benteng nilai luhur dan pelestari adat, kini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini menggambarkan kenyataan pahit bahwa warisan moral leluhur kini tak lebih dari bayangan kosong yang dihancurkan oleh kerakusan dan keserakahan.

Mafia tanah yang merajalela di Labuan Bajo adalah simbol kehancuran moral di tanah yang kaya akan tradisi. Mafia tanah itu bukan hanya sebuah skandal kriminal, tetapi kehancuran nilai-nilai adat yang mengikat masyarakat Manggarai. Tanah adat yang seharusnya menjadi saksi sejarah, simbol identitas, kini dirampas oleh tangan-tangan penguasa yang berkolusi. Ada pelbagai cara yang mereka lakukan yaitu memalsukan dokumen, memanipulasi hak ulayat, dan menjual tanah yang bukan milik mereka demi keuntungan pribadi.

Negara yang seharusnya melindungi hak rakyat, malah berperan sebagai

mediator diam-diam bagi skema kejahatan ini. Tanah yang dulu penuh dengan nilai-nilai kosmologi dan kehidupan kolektif, kini hanya objek diperjualbelikan tanpa rasa malu. Nilai-nilai yang telah dijaga selama berabad-abad, kini terlupakan begitu saja oleh mereka yang berkuasa.

Seharusnya "*Neka Daku Ngong Data*" menjadi pedoman yang tak boleh dilupakan dalam ingatan masyarakat Manggarai. Sebab, ini bukan sekadar ungkapan, tetapi sebuah seruan persuasif untuk menghormati hak orang lain, menjaga integritas, dan menjaga kehormatan yang dijunjung bersama. Karena pada akhirnya, pepatah ini mengandung pesan yang tak lekang oleh waktu: bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh akumulasi kekayaan, tapi seberapa dalam ia mampu menghormati batas milik orang lain dan merawat kesejahteraan.



Pepatah ini juga bukan sekadar penanda budaya, melainkan penjaga keadilan yang hidup di tengah maraknya ketidakadilan. Seharusnya tak hanya didengungkan dalam upacara adat (*lonto leok* atau musyawarah), tetapi ditanamkan dalam setiap kebijakan, pendidikan, dan tindakan publik. Sebab bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh nalar, tetapi oleh keberanian menjaga integritas dalam hal-hal yang tak terlihat.

Namun kini, pepatah itu hanyalah kalimat kosong yang terlupakan karena modernitas yang merongrong kearifan masyarakat Manggarai. Ketika "*Neka Daku Ngong Data*" hanya dipandang sebagai nostalgia masa lalu, maka integritas pun akan semakin sulit ditemukan pada orang-orang yang berkuasa. Dengan demikian korupsi, mafia tanah, dan penyelewengan terus mengembara dan bertunas di tanah Manggarai. Tindakan ini tentu saja tidak hanya merampas harta, tetapi merampas jiwa masyarakat itu sendiri.

Ini lebih dari sekadar hukum yang dilanggar. Ini adalah pembunuhan

terhadap moralitas. Ketika seruan "*Neka Daku Ngong Data*" menjadi hanya sebuah jargon kosong, maka masyarakat Manggarai kehilangan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi hidup dengan prinsip dasar kejujuran, tetapi terjerumus dalam kebohongan yang mengkhianati integritas.

Lebih dari penegakan hukum, revolusi moral adalah pilihan yang paling mendesak di tengah menjamurnya para koruptor di Manggarai. Sebuah gerakan untuk kembali kepada nilai-nilai yang selama ini menjadi pilar kehidupan untuk mengembalikan "*Neka Daku Ngong Data*" yakni panggilan untuk hidup dalam keadilan dan integritas kepribadian. Jika tidak, Manggarai akan kehilangan tanah adatnya karena jati diri para pemimpinnya tak berintegritas dan tenggelam dalam kehancuran moral yang tak terpulihkan.

*Neka Daku Ngong Data* harus kembali diserukan dan tertanam dalam hati kita masing-masing. Ia harus menjadi perlawanan terhadap pelbagai bentuk ingrat diri (keserakahan), penjaga keadilan, dan simbol dari integritas yang tak akan tergoyahkan. Jika tidak, maka tidak ada yang akan tersisa selain kerusakan dan pengkhianatan yang mengorbankan orang-orang kecil.

### Penutup

Penulis mengajak pembaca untuk tetap menjaga kearifan lokal di daerah kalian masing-masing. Jangan pernah menganggap itu sebagai kuno dan tak berguna. Penulis sebagai putra Manggarai mencoba membumikan pepatah adat ini dalam ingatan masyarakat pada umumnya. Penulis juga mengangkat pepatah adat sebagai bahan skripsi, agar tidak tergerus perkembangan zaman.

Pepatah "*Neka Daku Ngong Data*" hanya salah satu dari sekian banyak kearifan lokal yang ada. Pepatah adat ini menjadi benteng moral untuk menjinakkan kerakusan. Kemiskinan struktural dalam masyarakat selalu timbul dari hasrat ingrat diri atau solipsisme. Korupsi menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus merampas identitas dan kehormatan masyarakat yang sudah berakar. Revolusi moral adalah jawabannya. Pepatah adat "*Neka Daku Ngong Data*" harus menjadi panggilan hidup bersama, agar Manggarai bisa keluar dari kubangan ingrat diri.